



# Bansos Tak Terencana BPBD Sudah Habis April

Datangnya bencana tentu saja tidak bisa diprediksi oleh siapa pun. Sangat berat, apalagi bencana itu mengakibatkan kerusakan di mana-mana, baik rumah warga, fasilitas umum dan lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan, selain memiliki tugas terkait penanganan bencana, juga bertanggung jawab pascabencana. Salah satunya lewat pemberian bantuan sosial tidak terencana. Bansos untuk tahun 2018 ini dianggarkan dari APBD Induk Rp 1,9 miliar, atau naik Rp 400 juta dari tahun sebelumnya yang hanya dialokasikan Rp 1,5 miliar. Apakah selama ini sudah terencana dengan baik bansos itu?

SEJAK Januari-April ini, total dana bansos tidak terencana tersebut sudah tidak ada tersisa lagi alias habis. Hal itu dipicu banyaknya frekuensi bencana yang terjadi sejak awal tahun 2018 itu. "Hingga April ini, ada 107 titik yang dibantu dengan total anggaran sebesar Rp 1,6 miliar. Sisa dana masih Rp 200 juta sekian. Sekarang sedang dalam proses pengajuan untuk 12 titik lagi, dengan nilai Rp 270 juta," ujar Kepala BPBD Tabanan, I Gusti Ngurah Sucita.

Bahkan, anggaran bansos yang didapat dari dana induk APBD 2018 sebagian dipergunakan untuk menalangi sejumlah titik kejadian pascabencana akhir tahun 2017 yang belum diganti saat itu.

Bansos tidak terencana itu kata Ngurah Sucita, merupakan bantuan uang dan barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Sifat bantuan itu tidak secara terus-menerus dan selektif. Bantuan itu untuk melindungi kemungkinan terjadinya risiko sosial. Misalnya, korban bencana alam, jika tidak diberikan

belanja bantuan sosial, kondisi mereka akan semakin terpuruk. Bahkan, mereka tidak bisa hidup dalam kondisi wajar.

"Contohnya, ada rumah warga tertimpa pohon. Fasilitas rumah itu kemudian rusak akibat bencana. Korban yang tidak bisa berbuat apa-apa, jelas perlu mendapat bantuan," ucapnya. Bansos tidak terencana itu sudah ada sejak BPBD belum terbentuk di Tabanan. Bahkan kata Sucipta, sudah ada sejak di bawah naungan Kesbanglinmas. Anggaran induk bansos tahun 2018, mengalami peningkatan menjadi Rp 1,9 miliar dari sebelumnya Rp 1,5 miliar.

Terkait bantuan sosial tidak terencana yang disalurkan pascabencana, merupakan bentuk penanggulangan bencana setelah upaya tanggap darurat. Upaya itu tujuannya untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi korban atas bencana yang terjadi. Seperti adanya tanah longsor dan juga pohon tumbang. "Pemberian bantuan ini juga berpedoman pada standarisasi nilai kerusakan yang diatur pada Perbup tentang besaran dana santunan

itu," ujarnya.

Jika sebelumnya diatur pada Perbup Nomor 31 Tahun 2014. Setelah itu diperbarui dengan Perbup nomor 5 tahun 2018. Tentang pedoman besaran santunan dan bantuan sosial berupa uang kepada korban bencana. Perubahan Perbup itu mengatur standarisasi pemberian hibah bansos tidak terencana, dari kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk fasilitas umum masyarakat/pribadi seperti ada kerusakan rumah. Kerusakan kategori ringan diberikan bantuan mulai Rp 500 ribu hingga Rp 10 juta. Kategori rusak sedang Rp 10,1 juta hingga Rp 15 juta. Kategori rusak berat, maksimum Rp 25 juta. "Fasilitas umum diberikan Rp 100 juta," jelasnya.

(bit)



Kepala BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Sucita

Bali Post

## HIBAH BANSOS TAK TERENCANA

Kategori Rusak Ringan	Rp 500 Ribu – Rp 10 Juta
Kategori Rusak Sedang	Rp 10,1 – Rp 15 Juta
Kategori Rusak Berat	Rp 25 Juta
Fasilitas Umum Maksimal	Rp 100 Juta

Edisi : Senin, 30 April 2018

Hal : 7